



**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 10 TAHUN 1999**

**TENTANG  
TATA CARA PEMERIKSAAN DI BIDANG PERDAGANGAN  
BERJANGKA KOMODITI**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan, Bappebti berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap setiap Pihak yang diduga baik secara langsung maupun tidak langsung melakukan pelanggaran dan/atau yang terlibat dalam pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a di atas, perlu diatur mengenai tata cara pemeriksaan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN DI BIDANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau keterangan lain yang dilakukan oleh Pemeriksa untuk menentukan ada atau

tidaknya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

2. Pemeriksa adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Bappebti yang diangkat oleh Kepala Bappebti sebagai Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

## **BAB II**

### **DASAR PEMERIKSAAN**

#### **Pasal 2**

Pemeriksaan dilakukan berdasarkan:

- a. adanya laporan, pemberitahuan atau pengaduan tentang adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.
- b. tidak dipenuhinya kewajiban yang harus dilakukan oleh pemegang izin usaha, izin orang perseorangan, persetujuan atau sertifikat pendaftaran yang diberikan oleh Bappebti, atau pihak lain yang melakukan kegiatan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi; atau
- c. terdapat petunjuk tentang terjadinya perbuatan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

#### **Pasal 3**

Pemeriksaan dilakukan oleh Pemeriksa berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan dari Kepala Bappebti.

## **BAB III**

### **PEMERIKSA**

#### **Pasal 4**

Syarat-syarat menjadi Pemeriksa adalah :

- a. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Bappebti yang serendah-rendahnya berpangkat Penata Muda (Golongan III/a);
- b. lulus pendidikan Pemeriksa.

#### **Pasal 5**

Dalam pemeriksaan, Pemeriksa wajib :

- a. memiliki Surat Perintah Pemeriksaan dan Tanda Pengenal Pemeriksa dari Kepala Bappebti dan memperlihatkannya kepada Pihak yang akan diperiksa pada waktu akan melakukan pemeriksaan;
- b. memberitahukan secara tertulis tentang akan dilakukan pemeriksaan kepada Pihak yang akan diperiksa;
- c. menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada Pihak yang akan diperiksa;

- d. merahasiakan kepada Pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui dalam rangka pemeriksaan;
- e. membuat laporan hasil pemeriksaan.

## **BAB IV PIHAK YANG DIPERIKSA**

### **Pasal 6**

Dalam pemeriksaan, Pihak yang diperiksa:

- a. berhak meminta kepada Pemeriksa tembusan Surat Perintah Pemeriksaan dan memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa;
- b. berhak meminta kepada Pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan pemeriksaan;
- c. wajib menandatangani hasil pemeriksaan yang dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan.

## **BAB V PELAKSANAAN PEMERIKSAAN**

### **Pasal 7**

Pemeriksaan dilaksanakan sebagai berikut :

- a. pemeriksaan wajib dilakukan oleh lebih dari satu orang Pemeriksa;
- b. pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor Pemeriksa, di kantor atau di tempat usaha atau di gudang, atau di tempat tinggal Pihak yang diperiksa atau di tempat lain yang diduga ada kaitannya dengan pelanggaran yang terjadi;
- c. pemeriksaan dilaksanakan pada hari kerja dan jam kerja atau jika dianggap perlu dilakukan di luar jam kerja dan di luar hari kerja;
- d. hasil pemeriksaan dibuat dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan;
- e. Berita Acara Pemeriksaan wajib ditandatangani oleh Pemeriksa dan yang diperiksa.

### **Pasal 8**

(1) Dalam melakukan pemeriksaan, Pemeriksa dapat :

- a. meminta keterangan, konfirmasi, dan/atau bukti yang diperlukan dari Pihak yang diperiksa dan/atau Pihak lain yang diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan;
- b. memerintahkan Pihak yang diperiksa untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan tertentu;
- c. memeriksa catatan, pembukuan, dan/atau dokumen pendukung lainnya;
- d. meminjam atau membuat salinan atas catatan, pembukuan, dan/atau dokumen lainnya sepanjang diperlukan;
- e. memasuki tempat atau ruangan tertentu yang diduga merupakan tempat menyimpan catatan, pembukuan, dan/atau dokumen lainnya; dan

- f. memerintahkan Pihak yang diperiksa untuk mengamankan, menjaga dan memelihara catatan, pembukuan dan/atau dokumen lainnya untuk kepentingan pemeriksaan, yang berada dalam tempat atau ruangan sebagaimana dimaksud dalam huruf e, untuk kepentingan pemeriksaan.
- (2) Atas peminjaman catatan, pembukuan dan/atau dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan tanda bukti peminjaman yang menyebutkan secara jelas dan terinci jenis serta jumlahnya.

### **Pasal 9**

- (1) Apabila Pihak yang diperiksa atau wakil atau kuasanya menolak atau menghambat pemeriksaan, atau menolak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, maka yang bersangkutan wajib menandatangani Surat Pernyataan Menolak, Menghambat Pemeriksaan, atau Surat Pernyataan Menolak Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.
- (2) Apabila pegawai Pihak yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menolak untuk membantu atau menghambat kelancaran pemeriksaan, maka yang bersangkutan wajib menandatangani Surat Pernyataan Menolak Membantu atau Menghambat Kelancaran Pemeriksaan.
- (3) Apabila terjadi penolakan untuk menandatangani surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemeriksa membuat Berita Acara tentang penolakan tersebut yang ditandatangani oleh Pemeriksa.
- (4) Surat Pernyataan Menolak atau Menghambat Pemeriksaan, atau Surat Pernyataan Menolak Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Surat Pernyataan Menolak Membantu atau Menghambat Kelancaran Pemeriksaan atau Berita Acara tentang penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat dijadikan dasar untuk dilakukan penyidikan.

## **BAB VI**

### **LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Pemeriksa membuat laporan hasil pemeriksaan yang berisi analisa hukum, resume/kesimpulan, pendapat dan saran serta data dan fakta yang ditemukan Pemeriksa.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat :
  - a. sifat dan jenis pelanggaran;
  - b. bukti atau petunjuk adanya pelanggaran;
  - c. pengaruh atau akibat dari pelanggaran;

- d. tata cara peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi yang dilanggar; dan
  - e. hal-hal lain yang ditemukan dalam pemeriksaan.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) beserta Berita Acara Pemeriksaan disampaikan kepada Kepala Bappebti.

#### **Pasal 11**

- (1) Apabila dalam pemeriksaan ditemukan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Pemeriksa wajib segera membuat laporan kepada Kepala Bappebti mengenai temuan tersebut, dan pemeriksaan tetap dilanjutkan.
- (2) Berdasarkan bukti permulaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bappebti menetapkan dilaksanakannya penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

### **BAB VII**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 12**

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan mengenai tata cara pemeriksaan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, ditetapkan oleh Bappebti.

#### **Pasal 13**

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Januari 1999  
**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
ttd.  
**BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Januari 1999  
**MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
ttd.  
**AKBAR TANDJUNG**

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 17

=====

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 10 TAHUN 1999  
TENTANG  
TATA CARA PEMERIKSAAN  
DI BIDANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI**

**UMUM**

Agar kegiatan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi dapat dilaksanakan secara teratur, wajar, efektif dan efisien, serta masyarakat dapat dilindungi dari kerugian yang timbul akibat pelanggaran dari praktik yang merugikan dan tidak sejalan dengan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Bappebti mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap setiap Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Untuk menjamin agar pemeriksaan tersebut dapat terlaksana dengan lancar dan tertib dengan memperhatikan hak-hak dan kewajiban dari Pihak yang diperiksa, perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

**PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Angka 1  
Cukup jelas  
Angka 2  
Cukup jelas

**Pasal 2**

Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Cukup jelas  
Huruf c  
Cukup jelas

**Pasal 3**

Surat Perintah Pemeriksaan antara lain memuat nama Pemeriksa, nama Pihak yang diperiksa, objek yang diperiksa, dan jangka waktu pemeriksaan.

**Pasal 4**

Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Cukup jelas

**Pasal 5**

Huruf a

Surat Perintah Pemeriksaan diperlukan agar pemeriksaan hanya ditujukan terhadap Pihak yang diperiksa yang namanya tercantum dalam Surat Perintah Pemeriksaan.

Tanda Pengenal Pemeriksa dalam Pasal ini diperlukan agar pemeriksaan dilakukan hanya oleh Pemeriksa yang berwenang. Sebelum pemeriksaan dimulai, Pemeriksa wajib memperlihatkan Surat Perintah Pemeriksaan dan Tanda Pengenal Pemeriksa kepada Pihak yang akan diperiksa.

Apabila Pemeriksa tidak memperlihatkan Surat Perintah Pemeriksaan dan Tanda Pengenal Pemeriksa, atau apabila identitas Pemeriksa yang tercantum dalam Tanda Pengenal Pemeriksa tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Perintah Pemeriksaan, Pihak yang akan diperiksa berhak untuk menolak pemeriksaan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Ketentuan ini tidak membatasi kewenangan Bappebti untuk mengumumkan hasil pemeriksaan.

Huruf e

Cukup jelas

## **Pasal 6**

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

## **Pasal 7**

Dalam pelaksanaan pemeriksaan perlu ada ketentuan-ketentuan yang mengatur hal-hal yang berkaitan antara Pemeriksa dengan Pihak yang diperiksa yang wajib dipatuhi baik oleh Pemeriksa maupun oleh Pihak yang diperiksa, agar pemeriksaan dapat terlaksana dengan lancar dan tertib.

## **Pasal 8**

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan "membuat salinan" dalam huruf ini adalah termasuk pula menggandakan dengan cara memfotocopy.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Untuk mencegah agar pembukuan, catatan dan/atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Pihak yang diperiksa tidak dirusak, dimusnahkan, diganti, dipalsu, dipindahtangankan dan sebagainya, maka sebelum Pemeriksa meninggalkan tempat atau ruangan Pihak yang diperiksa, Pemeriksa dapat memerintahkan Pihak yang diperiksa untuk melakukan pengamanan terhadap dokumen-dokumen tersebut untuk kepentingan proses pemeriksaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

## **Pasal 9**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

## **Pasal 10**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

## **Pasal 11**

Ayat (1)

Dengan ditemukannya bukti permulaan tentang adanya tindak pidana, maka Kepala Bappebti memerintahkan penyidikan yang



dimaksudkan untuk mempertahankan kepastian hukum,  
sehingga semua pihak dapat menghindarkan diri melakukan  
pelanggaran atau terlibat dalam pelanggaran peraturan  
perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Ayat (2)

Cukup jelas

**Pasal 12**

Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan kesatuan persepsi dan  
kesatuan tindak berkenaan dengan tata cara pemeriksaan di bidang  
Perdagangan Berjangka Komoditi.

**Pasal 13**

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3806